

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. ANDI. Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/Tahun 2016. *Pedoman teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. 29 September 2016. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/Tahun 2021. *Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah*. 18 Agustus 2021. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/Tahun 2013. *Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26*. 18 April 2013. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/Tahun 2016. *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. 27 Juni 2016. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/Tahun 2014. *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. 24 Desember 2014. Jakarta.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Sepuluh. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. 17 Juli 2007. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. 25 Maret 2009. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 29 Oktober 2021. Jakarta.

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/274/436.1.2/2021. *Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya*. 19 Oktober 2021. Surabaya.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2021. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya*. 21 September 2021. Surabaya.

